

PEMBERITAAN MEDIA

LULUK'S UPDATE

EDISI

27 Juli – 2 Agustus 2020

**MENGUPAS DINAMIKA ISU LINGKUNGAN MINGGUAN
BERSAMA LULUK ULİYAH, SENIOR COMMUNICATION MADANI**

GUGATAN KARHUTLA

Gugatan KLHK terkait Karhutla Dikabulkan PT Pranaindah Gemilang Didenda Rp 238 Miliar Terkait Karhutla di Ketapang

- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan KLHK terhadap PT Pranaindah Gemilang (PG) terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
- Majelis hakim yang diketuai Hariyadi memutuskan PT PG terbukti telah menyebabkan terjadinya kebakaran lahan seluas 600 hektar dan mengakibatkan kerusakan lahan gambut di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
- PT PG dihukum membayar kerugian lingkungan hidup sebesar Rp 238 miliar
- KLHK menyebut majelis hakim juga menghukum PT PG tidak melakukan kegiatan apa pun dalam lahan gambut, membayar bunga denda sebesar 6 persen per tahun dari total nilai ganti rugi lingkungan hidup dan membayar perkara sebesar Rp 5,5 juta.

- Selain menggugat PT PG, KLHK saat ini juga menggugat lima perusahaan perkebunan yang diduga telah membakar lahan di areal perkebunan.
- Lima perusahaan perkebunan itu adalah :
 1. PT Sari Asri Rejeki Indonesia di PN Negeri Jakarta Barat,
 2. PT Rambang Agro Jaya di PN Jakarta Pusat,
 3. PT Asia Palem Lestari di PN Jakarta Utara,
 4. PT Sumber Sawit Sejahtera di PN Jakarta Pusat
 5. PT Putra Lirik Domas di PN Jakarta Utara.
- Total perusahaan yang digugat KLHK terkait dengan pembakaran hutan dan lahan sebanyak 19 perusahaan. Sebanyak sembilan di antaranya telah berkeputusan tetap.

PERHUTANAN SOSIAL

Update Capaian Perhutanan Sosial dan TORA

- Update realisasi Perhutanan Sosial hingga 24 Juni 2020
 - luas 4.194.689,82 hektar
 - untuk 860.770 KK
 - total unit 6.632 SK Izin/Hak.
- Untuk TORA, capaian hingga Juni 2020 adalah 63 persen, yaitu seluas 2.658.584 hektar.
- Capaian Perhutanan Sosial di Riau sebesar 121.464, 36 ha dengan 77 Unit SK dan 24.758 KK

- Agustus mendatang Presiden akan menyerahkan SK Perhutanan Sosial dan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)
- kira-kira hampir 700 unit SK, luasnya kira kira 600-700 ribu hektare.
- Lokasi yang dipilih adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm) Gempa 01 di Desa Kurau Barat, Kec. Koba, Kab. Bangka Tengah, Prov. Kep. Bangka Belitung
- Kawasan HKm seluas 213 hektare ini pernah menjadi juara Terbaik I Kategori Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Lomba Wana Lestari tahun 2018 oleh KLHK.
- Di dalam HKm, masyarakat diberikan akses mengelola hutan.
- Kegiatan kelompok masyarakat yang terjadi disana meliputi Ekowisata, Silvofishery, Konservasi dan pelestarian mangrove, Pendidikan lingkungan, dan Persemaian.

- Rencana dipilihnya lokasi HKm Gempa 01 di Bangka Belitung ini juga terkait isu-isu penting, seperti reaktivasi ekowisata mangrove, penguatan ekonomi masyarakat melalui Silvofishery, konservasi dan pelestarian hutan mangrove, serta rehabilitasi mangrove. Isu-isu tersebut sedikit banyak juga berhubungan dengan upaya membangkitkan ekonomi masyarakat di tengah Pandemi Covid-19 melalui adaptasi kebiasaan baru.

HUTAN ADAT

Hutan Adat Sungai Utik Mendapatkan SK Penetapan Hutan Adat

- Setelah 40 tahun menanti pengakuan, Hutan Adat Sungai Utik akhirnya mendapat pengakuan lewat SK Nomor: 3238/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL. 1/5/2020
- SK ini menetapkan Hutan Adat Menua Sungai Utik kepada masyarakat hukum adat Dayak Iban Menua Sungai Utik Ketemenggungan Jalai Lintang seluas 9.480 hektare.
- Pengakuan hutan adat ini membuat masyarakat Dayak Iban mempunyai payung hukum dalam menjaga dan mengelola hutan
- Pemerintah butuh puluhan tahun untuk mengakui hutan adat masyarakat Iban Sungai Utik. Padahal sejak 1970-an warga Dayak Iban tak kenal lelah menolak keras tawaran sejumlah perusahaan kayu dan sawit yang ingin membeli tanah mereka. Mereka menolak lantaran filosofi hidupnya terikat dengan hutan. Mereka bahkan memiliki tata cara pengelolaan hutan dan hukum secara adat.

- Di sana ada rumah betang (rumah panjang) milik masyarakat Dayak Iban yang panjangnya 216 meter, dengan 28 bilik, dan dihuni 300 orang. Tiap pintu dihuni satu keluarga dan keturunannya.
- Berdasarkan data monografi Dusun Sungai Utik 2015, terdapat 89 kepala keluarga yang menempati 28 bilik di sepanjang rumah betang.
- Di sekitar rumah betang, terdapat 40 rumah yang semuanya berkerabat.
- Dalam kehidupan suku Dayak Iban Komunitas Iban Sungai Utik, mereka memiliki kriteria fungsi dan manfaat serta pengelolaan dari masing-masing wilayah. Dalam tata guna lahan ada kawasan lindung yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan alam. Masyarakat adat menyebut hutan lindung sebagai sumbernya kehidupan. Tidak ada masyarakat adat yang menebang kayu untuk tujuan komersil. Mereka menebang di hutan kelola adat dan untuk kebutuhan sendiri. Misalnya, menebang 1 pohon, tapi menanam 5 pohon lainnya.

- Ada batas wilayah kelola masyarakat dengan hutan primer. Biasanya dengan melihat damun (bekas ladang). Orang Iban membuka lahan untuk ladang. Setelah itu, kawasan yang sudah dibuka akan ditinggalkan peladangnya dan membiarkan pepohonan tumbuhan seperti sediakala selama 15-20 tahun. Membuka lahan pun tidak asal-asalan. Lahan yang dibuka tak lebih dari dua hektare
- Berdasarkan risalah pengolahan data penetapan hutan adat Menua Sungai Utik, kawasan hutan tersebut berada di hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan area penggunaan lain. SK tersebut sekaligus menetapkan Hutan Adat Menua Sungai Utik sebagai fungsi lindung dan produksi. Hutan tidak boleh diperjualbelikan dan dipindahtangankan kepada pihak lain.

KARHUTLA

Jambi Persiapan Antisipasi Karhutla

- 145 Titik Api Terpantau di Wilayah Gambut di Jambi
 - KKI Warsi belum melakukan pemantauan secara khusus terhadap karhutla karena masih ada hujan.
 - Jika mengacu data SiPongi KLHK, sudah ada titik api yang terpantau walaupun jumlahnya sangat sedikit.
 - tahun ini Jambi diuntungkan karena musim kemaraunya tidak ekstrem.

Rudi Syaf
Direktur KKI Warsi

Rudi Syaf
Direktur KKI Warsi

- Dan karena status siaga darurat karhutla sudah diterapkan lebih awal, yaitu sejak 29 Juni 2020, cukup membantu mengatasi kebakaran hutan dan lahan.
- Kendati demikian, tidak menampik adanya potensi karhutla di Jambi.
- gambut masih cukup rawan, karena pemegang izin di kawasan tersebut belum banyak melakukan perbaikan dalam sistem drainase mereka.
- Kanal masih sangat banyak dan kedalaman muka air juga masih tinggi, belum mematuhi aturan pemerintah yaitu 40 cm dari muka tanah

Rudiansyah
Direktur Eksekutif
Walhi Jambi

- hasil pantau melalui hotspot modis LAPAN, Provinsi Jambi sejak 1 Juli 2020 hingga 27 Juli 2020, ada 145 hotspot, dengan komposisi tingkat kepercayaan high ada 23 hotspot dan medium 122 hotspot.
- Terkait apakah hotspot atau titik panas itu menghasilkan karhutla atau tidak, perlu dicek langsung di lapangan.
- Tetapi warning hotspot ini bisa salah satu menjadi alat atau indikator pemerintah untuk selalu siaga dan antisipasi agar tidak terjadi karhutla
- Sejauh ini, Walhi Jambi belum melakukan pengecekan langsung ke lapangan, apakah terjadi karhutla atau tidak sejak 1-27 Juli 2020 ini. Hal ini karena masih adanya intensitas hujan yang terjadi di Jambi, baik kecil, sedang, bahkan tinggi di beberapa spot atau wilayah di Provinsi Jambi.

Teknologi Modifikasi Cuaca Di Riau

- Tim Teknologi Modifikasi Cuaca menurunkan hujan buatan beroperasi di Riau untuk ketiga kalinya pada tahun ini.
- Ini untuk mengantisipasi puncak jumlah titik hotspot kebakaran hutan dan lahan di wilayah itu pada Agustus hingga September.
- Telah beroperasi secara bertahap sejak Maret lalu, harapannya siaga darurat ini bisa efektif tak mengulang bencana kabut asap pada tahun-tahun sebelumnya.

Tri Handoko Seto, Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (BBMTC) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

- Tidak perlu menunggu terjadi kebakaran yang meluas dan sangat sulit bahkan nyaris tidak mungkin dipadamkan
- berdasarkan historis fluktuatif jumlah titik hotspot kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau cenderung meningkat pada Maret.
- Jumlah itu memuncak pada Agustus hingga September

- Operasi ketiga membasahi wilayah Riau dan sekitarnya telah dilakukan sejak 24 Juli lalu dan telah menghasilkan 2,2 juta meter kubik air hujan per Senin.
- Jumlah itu menambah hasil dua operasi sebelumnya pada 11 Maret-2 April dan 13-31 Mei lalu. Saat itu, digabung dengan operasi yang sama di Sumatera Selatan dan Jambi 2-14 Juni, berhasil menurunkan sebanyak 165 juta meter kubik hujan buatan.

Sutrisno, Pelaksana harian Kepala BBTMC juga Pelaksana tugas Kepala Bidang Pelayanan Teknologi BBTMC

- kebutuhan hujan buatan di Riau dikuatkan dengan data ketinggian air tanah di lahan gambut berdasarkan instrumentasi pemantauan Badan Restorasi Gambut.
- Lebih dari 70 persen data di wilayah itu menunjukkan nilai rawan atau bahaya.
- Kondisi ini sudah terjadi sejak awal bulan Juli
- Untuk itu perlu dilaksanakan upaya pembasahan kembali, salah satunya dengan teknologi modifikasi cuaca, agar ketinggian air tanah di lahan gambut dapat naik kembali

- operasi TMC Riau diaktifkan kembali atas arahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku pemegang pendanaan kegiatan ini. Tim didukung pesawat CASA 212 nomor registrasi A-2107 milik TNI-AU.
- Setiap hari sudah terjadi hujan dan hingga kemarin total volume hujan capai 2,2 juta meter kubik
- Selain di Provinsi Riau, BBTMC juga tengah menyiapkan operasi siaga darurat kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

FOOD ESTATE

Proyek Lumbung Pangan di Kalteng Harus Berkelanjutan

- Pemerintah mengklaim proyek Lumbung Pangan atau Food Estate menerapkan sistem berkelanjutan. Berkelanjutan itu dimaksud dengan pengelolaan gambut yang lebih bijak dibandingkan proyek pangan di lahan gambut puluhan tahun lalu. Pemerintah menjanjikan proyek itu tidak bertabrakan dengan program restorasi gambut.
 - Food estate tidak bertabrakan dengan pengelolaan atau restorasi gambut, jadi pasti ada sinkronisasi. Ini program berkelanjutan dan ramah lingkungan karena menggunakan teknologi modern dan mekanik
 - kerusakan gambut menjadi kekhawatiran banyak pihak dalam pelaksanaan proyek lumbung pangan. Namun, dalam pengelolaannya pemerintah akan menghindari kubah gambut dan tetap membuat tata kelola air.

Fahrizal Fitri

Sekretaris Daerah

Provinsi Kalteng

Fahrizal Fitri
Sekretaris Daerah
Provinsi Kalteng

- Food estate tidak bertabrakan dengan pengelolaan atau restorasi gambut, jadi pasti ada sinkronisasi. Ini program berkelanjutan dan ramah lingkungan karena menggunakan teknologi modern dan mekanik
- kerusakan gambut menjadi kekhawatiran banyak pihak dalam pelaksanaan proyek lumbung pangan. Namun, dalam pengelolaannya pemerintah akan menghindari kubah gambut dan tetap membuat tata kelola air.
- Di tahap awal ini memang khusus padi dulu, tetapi ke depan dengan luasan yang akan ditambah komoditasnya juga beragam
- pihaknya tak hanya menggunakan saluran irigasi dengan pintu air tetapi juga menggunakan pompa air untuk wilayah yang tidak memiliki kanal.

Fahrizal Fitri
Sekretaris Daerah
Provinsi Kalteng

- untuk menghindari kerusakan lingkungan pihaknya menghindari kubah-kubah gambut dengan kedalaman di atas 4 meter. Kawasan itu nantinya akan menjadi kawasan lindung.
- beberapa kawasan di proyek lumbung pangan tersebut masuk dalam kawasan hutan atau hutan lindung.
- kawasan-kawasan itu akan dialihkan menjadi kawasan produksi.

- Salah satu kanal primer di lahan bekas PLG tahun 1995 di wilayah Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Kamis (9/7/2020). Kanal itu menurut rencana bakal direhabilitasi untuk keperluan program lumbung pangan.
- Proyek lumbung pangan dilaksanakan di atas lahan bekas proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) tahun 1995 yang total luas lahannya mencapai 1,4 juta hektar. Proyek gagal itu merusak kubah-kubah gambut dengan banyaknya kanal dan pemotongan pohon yang dibuat sehingga menjadi pusat kebakaran hutan dan lahan.
- Sejak saat itu hingga kini kebakaran hutan dan lahan terus terjadi di wilayah tersebut. Tahun 2019, lahan seluas 317.749 hektar lahan terbakar di Kalimantan Tengah. Sebagian besar wilayah itu berada di atas proyek PLG.

- Proyek lumbung pangan tersebut diklaim sudah berjalan selama lebih kurang sebulan belakangan dengan memanfaatkan lahan persawahan yang sudah ada ataupun yang selama ini terbengkalai. Setidaknya 30.000 hektar lahan atau sama dengan setengah luas Provinsi DKI Jakarta disiapkan. Pemerintah pun mulai memperbaiki saluran irigasi atau kanal yang sudah puluhan tahun dibuat dan menjadi sumber banjir.
- Lokasi yang digunakan berada di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas. Rinciannya, seluas 10.160 hektar berada di Pulang Pisau dan 20.000 hektar di Kapuas. Wilayahnya meliputi 13 kecamatan di dua kabupaten tersebut.

Dimas Hartono
Direktur Walhi
Kalteng

- Dengan melakukan perluasan sawah di atas gambut maka secara otomatis akan membuat kanal-kanal baru. Dengan demikian, ekosistem gambut pun akan kering.
- Besarnya anggaran untuk pembangunan proyek lumbung pangan ini lebih baik digunakan untuk memaksimalkan kegiatan pertanian dan perladangan yang tersebar di seluruh Kalteng
- pemerintah harusnya mengidentifikasi lahan mana saja di Kalteng yang terancam karena kawasan pertanian yang masuk dalam kawasan hutan atau terancam investasi.

RESTORASI GAMBUT

Restorasi Gambut Menjadi Kebutuhan untuk Pencegahan Kebakaran

Teguh Surya
Direktur Eksekutif
Yayasan Madani
Berkelanjutan

- Karhutla yang terjadi setiap tahun belum sepenuhnya dapat ditangani dengan maksimal. Pemerintah diharapkan tetap memprioritaskan agenda restorasi gambut untuk memperbaiki jutaan hektar lahan gambut yang rusak dan mencegah karhutla.
- Dari analisis, karhutla pada 2019 mayoritas terjadi di wilayah dengan prioritas restorasi gambut. Wilayah tersebut juga merupakan kawasan deforestasi dan lahan yang sudah terdegradasi.

Teguh Surya
Direktur Eksekutif
Yayasan Madani
Berkelanjutan

- Berdasarkan jejak terbakar lima tahun terakhir, itu merupakan kawasan hutan yang kualitasnya sudah menurun dan wilayah gambut yang rusak. Kedua, wilayah karhutla terluas sebanyak 30 persen terjadi di tutupan lahan semak belukar
- Berkaca dari kondisi tersebut, pencegahan karhutla dapat dilakukan dengan menjaga kualitas hutan dan lahan gambut. Penegakan hukum dan pengawasan juga harus dioptimalkan karena selama ini kedua unsur tersebut masih lemah.

Sumber Berita

- <https://katadata.co.id/padjar/berita/5f223faa519b6/40-tahun-menanti-pengakuan-hutan-adat-sungai-utik>
- <https://regional.kompas.com/read/2020/07/29/12493601/p-t-pranaindah-gemilang-didenda-rp-238-miliar-terkait-karhutla-di-ketapang?page=2>
- <https://www.jpnn.com/news/menteri-siti-mengunjungi-kawasan-hutan-sosial-di-bangka-belitung>
- <https://klikbabel.com/2020/07/28/menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-lhk-kunjungi-hutan-mangrove-kurau-bateng>
- <https://tirto.id/perusahaan-sawit-terbukti-bakar-lahan-gambut-kalbar-didenda-rp238-m-fUo1>
- <https://jambi.tribunnews.com/2020/07/27/145-titik-api-terpantau-wilayah-gambut-di-jambi-rawan-karhutla>
- <https://tekno.tempo.co/read/1369912/siaga-darurat-kebakaran-hutan-tim-tmc-hujan-buatan-kembali-ke-riau>
- <https://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2020/07/29/menteri-lhk-kunjungi-lokasi-penyerahan-sk-perhutanan-sosial-dan-tora-se-sumatera>
- <https://klikbabel.com/2020/07/28/menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-lhk-kunjungi-hutan-mangrove-kurau-bateng>
- <https://sumatra.bisnis.com/read/20200727/534/1271887/siti-nurbaya-tinjau-wisata-edukasi-hutan-bakau-munjang-kurau-barat>
- <https://nasional.kontan.co.id/news/hingga-24-juni-realisisi-perhutanan-sosial-mencapai-41-juta-hektare>
- https://rri.co.id/bengkalis/publik/875642/klhk-gelar-rakor-secara-daring-untuk-wilayah-sumatra?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign
- <https://www.goriau.com/berita/baca/daerah-diminta-tingkatkan-program-perhutanan-sosial-ini-alasannya.html>

LULUK'S UPDATE

**MENGUPAS DINAMIKA ISU LINGKUNGAN MINGGUAN
BERSAMA LULUK ULIAH, SENIOR COMMUNICATION MADANI**

**SETIAP SENIN
9.00 – 9.30 WIB**



@madaniberkelanjutan.id

Madani

